KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penetapan Fraksi dan AKD, Ketua DPR: Komisi Tak Boleh Bermitra Ganda
Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

Penetapan Fraksi dan AKD

Ketua DPR: Komisi Tak Boleh Bermitra Ganda

[JAKARTA] Ketua DPR Puan Maharani akan menyederhanakan hubungan antara kementerian dan komisi-komisi di parlemen. Satu komisi hanya boleh bermitra dengan satu kementerian atau tak boleh bermitra ganda.

"Sehingga, nantinya diharapkan komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," ujar Puan Maharani, Selasa (29/10).

Pada periode kali ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya dibahas di Komisi IV. "Semula dibahas di Komisi IV dan Komisi VII, sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi," ujar Puan.

Kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian tercapai dalam Rapat Konsultasi DPR Pengganti Bamus yang dihadiri pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi, Senin (28/10). Kesepakatan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna Ke IV DPR

Rapat Paripurna juga sekaligus mengesahkan 11 Komisi DPR beserta ruang lingkup dan tugasnya.

DPR telah menetapkan keanggotaan untuk alat kelengkapan dewan (AKD) dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa siang, 29 Oktober 2019. DPR juga mulai menetapkan pimpinan, terdiri dari ketua dan wakil ketua, di setiap AKD.

"Setelah melewati mekanisme yang ada bisa kami sepakati bersama untuk penetapan dan pelantikan ketua-ketua dan anggota-anggota yang ada di komisi-komisi," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seusai rapat paripurna.

Selain menetapkan keanggotaan dan pimpinan AKD, rapat paripurna juga mengesahkan mitra kerja dari setiap komisi. Setiap alat kelengkapan dewan terdiri dari komisi, badan, dan panitia khusus yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Ketentuan tentang AKD ini diatur dalam UU13/2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3



ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Pimpinan DPR memimpin rapat paripurna ke-4 masa persidangan I Tahun 2019-2020 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Komisi III

Pimpinan Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan ditetapkan seusai rapat paripurna. Ketua Komisi III DPR 2019-2024 adalah Herman Herry dari Fraksi PDI-P.

Penetapan digelar di ruang rapat Komisi III, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10). Puan awalnya membacakan calon ketua dan wakil ketua Komisi III yang akan ditetapkan. Mereka adalah Herman Herry dari F-PDIP sebagai ketua, selanjutnya wakil ketua adalah Adies Kadir dari F-Golkar, Desmond J Mahesa dari F-Gerindra, Ahmad Syahroni dari F-Nasdem, dan Mulfachri Harahap dari F-PAN.

Selanjutnya, Puan meminta persetujuan anggota Komisi III yang hadir untuk menetapkan nama-nama pimpinan. Puan lalu mengetuk palu sidang tanda penetapan.

"Apakah nama-nama calon pimpinan Komisi III DPR yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan sebagai pimpinan Komisi III?" tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota yang hadir.

Puan pun mengucapkan selamat kepada pimpinan Komisi III yang baru ditetapkan. Ia berharap agar pimpinan dan anggota Komisi III dapat bekerja cepat memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Khususnya kepada pimpinan Komisi III DPR dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara serta memperjuangkan aspirasi rakyat dan mungkin Komisi III ini yang akan bekerja paling cepat mulai hari ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang harus diselesaikan dalam waktu singkat," ucapnya.

Agenda penetapan dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dari Puan kepada Ketua Komisi III Herman Herry. Puan didampingi para Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel, sementara Herman didampingi empat wakil ketua Komisi III.

Selain menetapkan pimpinan Komisi III, DPR juga menetapkan susunan formasi pimpinan Komisi I. Anggota Komisi I sepakat posisi ketua dijabat oleh anggota DPR Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid.

Kesepakatan formasi pimpinan diambil dalam rapat di ruang Komisi I, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Rapat dihadiri oleh 24 anggota Komisi I dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Puan awalnya mengungkapkan kembali hasil rapat konsultasi antarfraksi di DPR pada 18 Oktober 2019. Dalam rapat tersebut ditetapkan usulan formasi pimpinan Komisi I.

"Berdasarkan usulan fraksi tersebut, Ketua dari Fraksi Golkar Meutya Hafid, Wakil Ketua dari Fraksi PDIP Utut Adianto, Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra Bambang Kristiono, Wakil Ketua dari Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari," kata Puan. [H-14]